

DISPARITAS KESIAPAN SEKOLAH NEGERI DAN SEKOLAH SWASTA DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI

Umi Kulsum

SMK Negeri 5 Malang

Surel: kulsum2406@gmail.com

Abstract: Disparity in the Readiness of Public Schools and Private Schools in Improving the Quality of Vocational Education. The purpose of this study is to determine the disparity in public school and private school preparedness in vocational schools as an effort to improve the quality of vocational education. Research conducted includes governance of institutions, teachers and education personnel, learning curriculum and graduate work. The study was conducted at one of the state vocational schools and private vocational schools in Malang Raya. This research is a qualitative descriptive study using a phenomenological approach. Data collection techniques through observation and interviews. The results showed differences in terms of institutional governance, teachers and education personnel, learning curriculum, and graduate work. The conclusion of this study is the disparity in the quality of education because the government in implementing policies in the field of education has not been evenly distributed. Thus improving the quality of vocational education can be realized.

Keywords: disparity, school readiness, quality of vocational education

Abstrak: Disparitas Kesiapan Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Vokasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui disparitas kesiapan sekolah negeri dan sekolah swasta di lingkungan SMK sebagai upaya dalam peningkatan mutu pendidikan vokasi. Penelitian yang dilakukan meliputi tata kelola lembaga, guru dan tenaga kependidikan, kurikulum pembelajaran, serta kebermanfaatan lulusan. Penelitian dilakukan di salah satu SMK negeri dan SMK swasta di Malang Raya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan ditinjau dari tata kelola lembaga, guru dan tenaga kependidikan, kurikulum pembelajaran, serta kebermanfaatan lulusan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya disparitas mutu pendidikan karena pemerintah dalam menerapkan kebijakan bidang pendidikan belum merata. Dengan demikian peningkatan mutu pendidikan vokasi bisa terwujud.

Kata kunci: disparitas, kesiapan sekolah, mutu pendidikan vokasi

PENDAHULUAN

Di era informasi sekarang ini pengetahuan menjadi sangat penting karena menjadi sumber yang dibutuhkan untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan tinggi dalam menerapkan pengetahuan dan teknologi. Dampak dari era informasi bagi pendidikan di Indonesia dapat dinilai baik karena memberikan perubahan ke arah positif dari era yang sebelumnya. Ilmu pengetahuan dan

teknologi serta kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing suatu bangsa. Meskipun memiliki keunggulan komparatif dalam sumber daya alam, suatu bangsa akan tidak banyak berbuat dalam kancah persaingan global tanpa didukung oleh keunggulan sumber daya manusia (SDM). Globalisasi industri memberikan dampak pada dunia pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan yaitu SMK. Globalisasi juga

melahirkan tuntutan perubahan pendidikan kejuruan (SMK) di segala bidang.

Pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan tertentu (Damarjati, 2016). Karakteristik pendidikan kejuruan disamping diarahkan siap untuk memasuki lapangan kerja, juga ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Pendidikan kejuruan sangat penting karena memberikan kontribusi dalam mempersiapkan SDM yang terampil dan memiliki daya saing tinggi.

Namun tantangan dan masa depan SMK di masa disrupsi dan hadirnya revolusi industri 4.0 semakin berat. Proses pembelajaran di SMK harus berbasis aktivitas secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Selain itu, proses pembelajaran juga memberikan ruang untuk berkembangnya keterampilan abad ke-21, yaitu kreatif, inovatif, berfikir kritis, pemecahan masalah, kolaboratif, dan komunikatif, yang kesemuanya itu digunakan untuk menyongsong era revolusi industri 4.0, dan tantangan masa yang akan datang.

Untuk menjawab tantangan serta mengatasi dampak era revolusi industri 4.0 tersebut diperlukan persiapan khusus untuk mengimbangi fenomena revolusi industri 4.0. Seperti SDM yang berkualitas dengan dibekali *skill* serta pengetahuan yang relevan, sehingga lulusan SMK akan mampu bersaing dalam menghadapi tantangan dan mampu meraih sukses di industri. SMK Tata Busana merupakan salah satu SMK dengan tujuan ingin mempersiapkan

lulusannya agar siap untuk berkiprah di dunia usaha dan industri. Oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi program pembelajaran yang ada di sekolah dengan di industri. Dandira, T. (2017) mengemukakan bahwa sinkronisasi sangat diperlukan agar tercapai program pembelajaran di sekolah dan di industri.

SDM yang berkualitas sebagai *outcome* dari pendidikan sangat diperlukan untuk membangun masyarakat agar dapat bersaing secara internasional. Untuk dapat menghasilkan SDM yang berkualitas, disamping dari unsur lulusan SMK (peserta didik), maka kualitas pendidik (guru) juga menjadi sorotan utama. Kualitas pendidik adalah penentu keberhasilan pengembangan pendidikan di Indonesia. Guru sebagai guru atau pendidik adalah salah satu faktor penentu keberhasilan upaya pendidikan apa pun. Guru yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas juga.

Dalam proses pendidikan, guru memegang peranan yang sangat penting, sebab keberhasilan pelaksanaan proses pendidikan sangat tergantung pada guru. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional No 14 tahun 2010 mengenai Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru, bahwa “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah “ Guru merupakan fasilitator utama dalam suatu proses pendidikan, sehingga diperlukan guru yang berkualitas guna tercapainya suatu pendidikan yang berkualitas juga.

Guru juga merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap

terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya Oakes (dalam Jatirahayu, W. 2013) menyatakan bahwa kualitas sekolah dan kualitas pengajaran adalah fungsi dari kualitas guru. Mulyasa (2013 :18) karakteristik guru yang dinilai kompeten secara profesional adalah guru yang mampu mengembangkan tanggungjawab dengan baik, melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat, mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah serta mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas. Jadi guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi atau standar mutu yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Dengan kompetensi yang dimiliki, guru diharapkan dapat merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan baik, menjadi teladan bagi peserta didik serta mampu mengembangkan profesinya.

Pengembangan pendidikan kejuruan (SMK) dalam menghadapi daya saing ketenagakerjaan, pemerintah sedang menggalakkan pendidikan vokasi yang diarahkan untuk menyediakan kerja terampil di dunia usaha. Pendidikan vokasi memiliki tujuan mencetak SDM lulusan SMK yang berkompeten yang siap terjun ke dunia industri serta memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Program penyiapan tenaga kerja terampil di SMK tersebut adalah dengan pengembangan kebecerjaan lulusan SMK. Demikian juga dengan kesiapan sekolah dalam mengembangkan pendidikan vokasi baik secara fisik, reformasi kurikulum, maupun peningkatan mutu lulusan, secara holistik sangat diperlukan untuk

menciptakan *output* yang profesional dan berdaya saing.

Aspek kesiapan ini perlu diperhatikan. Slameto (2013: 113) mengemukakan bahwa kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respons/jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Samson (dalam Hanafiah and Suhana, 2012: 22) mengemukakan kesiapan adalah kesediaan untuk mengambil tindakan. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan kesiapan adalah suatu keadaan dimana individu bersedia memberikan reaksi atau jawaban ketika diberikan suatu tindakan atau dalam suatu kondisi tertentu. Demikian juga aspek kesiapan dalam penelitian ini adalah kesiapan sekolah yang meliputi kesiapan (1) peserta didik, (2) guru, (3) faktor infrastruktur yang berkaitan dengan kesiapan sekolah untuk menyediakan sarana dan prasarana, (4) faktor dukungan manajemen sekolah, (5) faktor budaya sekolah yang diterapkan menjadi salah satu tolok ukur karena kebiasaan baik antara guru dan peserta didik

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dan dari hasil penelitian terdahulu, terkait kesiapan sekolah dalam mengembangkan pendidikan vokasi, artikel penelitian ini berjudul “Disparitas Kesiapan Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Vokasi”.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan pendekatan fenomenologi. Adalah pendekatan yang didasari atas pandangan dan asumsi bahwa pengalaman manusia diperoleh

malalui hasil interpretasi. Arti yang diberikan oleh seseorang terhadap pengalamannya dan proses interpretasi sangat penting, dan hal itu dapat memberikan arti yang sangat khusus (Danim, Sudarwan, 2013). Metode kualitatif juga diartikan sebagai metode penelitian dalam mendeskripsikan fenomena berdasarkan sudut pandang para informan, menemukan realita yang beragam dan mengembangkan pemahaman secara holistik tentang sebuah fenomena dalam konteks tertentu (Hilal dan Alabri: 2013). Selanjutnya Creswell dikutip Eddles-Hirsch (2015) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang tertarik untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengalaman sebuah fenomena individu dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian fenomenologi ini mejadi penelitian yang memiliki daya tarik tersendiri karena semakin banyak diminati oleh para peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Pendekatan fenomenologi tidak hanya dilakukan oleh para peneliti pada bidang ilmu sosial tetapi juga merambah ke disiplin ilmu lainnya termasuk bidang pendidikan. Fenomenologi sebagai metode penelitian juga memiliki kelebihan. Pertama, sebagai metode keilmuan, fenomenologi dapat mendeskripsikan dan menggambarkan suatu fenomena secara apa adanya tanpa memanipulasi data di dalamnya. Kedua, metode ini memandang objek kajiannya sebagai sesuatu yang utuh dan tidak terpisah dengan objek lain. Artinya, pendekatan ini menekankan pada pendekatan yang holistik dan tidak parsial sehingga diperoleh pemahaman yang utuh tentang suatu objek.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah salah

satu SMK negeri dan SMK swasta di Malang Raya. Rekomendasi diberikan pada SMK Negeri 7 Kota Malang dan SMK Budi Utomo Kabupaten Malang. Penelitian dikhususkan pada program keahlian Tata Busana. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara semi terstruktur. Ada hal-hal yang disampaikan kepada subjek penelitian sebelum dilakukan proses wawancara, yaitu: (1) tujuan wawancara dan kepentingan peneliti, (2) kerahasiaan, (3) prosedur penelitian, dan (4) persiapan untuk memulai wawancara.

Observasi dilakukan untuk mengamati proses pembelajaran secara umum. Dan wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data tentang masalah-masalah pembelajaran. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Oun dan Bach (2014) menyebut metode kualitatif merupakan metode untuk menguji dan menjawab pertanyaan tentang bagaimana, dimana, apa, kapan, dan mengapa seseorang bertindak dengan cara-cara tertentu pada permasalahan yang spesifik.

PEMBAHASAN

Pendidikan Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia dan berimplikasi pada berbagai lembaga yang diperintahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi. Ada tiga instruksi yang diberikam kepada BNSP, yaitu (1) mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK, (2) Mempercepat

sertifikasi kompetensi bagi pendidik dan tenaga pendidik SMK, (3) Mempercepat pemberian lisensi bagi pihak SMK, sebagai LSP pihak pertama. Sementara itu instruksi kepada para gubernur adalah: (1) Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayah masing-masing, (2) menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas, (3) melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK, (4) mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing

Pemahaman tentang pengembangan pendidikan kejuruan secara holistik sangat diperlukan untuk menghasilkan guru kejuruan yang profesional dan berdaya saing. Upaya-upaya strategis dan antisipatif tersebut salah satunya agar tidak terjadi disparitas yang begitu menonjol di lingkungan SMK baik negeri maupun swasta.

Disparitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “disparitas” artinya perbedaan. Pengertian disparitas disini adanya perbedaan atau jarak. Bahwa telah terjadi sebuah kesenjangan atau ketimpangan. Dalam hal ini disparitas jika kita sesuaikan dengan tema dalam artikel ini adalah disparitas SMK negeri dan SMK swasta dalam menyiapkan unsur kelembagaannya untuk menyelenggarakan pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan vokasi.

Pendidikan Vokasi

Istilah *vokasi*, kita menyebutnya kejuruan, digunakan untuk program pendidikan menggantikan istilah Profesional atau Profesi. Untuk

profesional atau profesi tentu ke jenjang lebih tinggi. Istilah vokasi mungkin diturunkan dari bahan Inggris, *vocation*. Di Amerika Serikat, vokasi digunakan untuk menyebut pengelompokan sekolah kejuruan. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu lembaga pendidikan yang bertanggungjawab untuk menciptakan SDM yang memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian, sehingga lulusannya dapat mengembangkan kinerja apabila terjun dalam dunia kerja.

SMK yang tetap dipertahankan keberadaannya harus ada reformasi total dimana SMK harus betul-betul spesifik dan unik serta menjanjikan keahlian khusus yang dibutuhkan masyarakat. Karena keunikannya, SMK yang demikian sangat sedikit jumlahnya, dan setiap SMK punya keluwesan mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. SMK yang menarik karena keunikannya. SMK yang demikian kalau ditangani tenaga profesional akan menjadi unggulan dan diminati masyarakat. Tantangan ke depan dalam pendidikan kejuruan adalah bagaimana agar SMK diminati kalangan mampu, bukan sekedar tempat bersekolah demi status sosial dan bukan sekedar upaya untuk peningkatan pendidikan menengah.

Semakin tinggi tuntutan terhadap mutu pendidikan kejuruan semakin tinggi tantangan yang dihadapi guru kejuruan dan pendidikan guru kejuruan. Pendidikan guru kejuruan yang bermutu menuntut standarisasi gurunya. Guru yang berstandar membutuhkan pendidikan guru kejuruan yang berstandar pula. Pendidikan calon guru kejuruan produktif yang berkualitas sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu lulusan SMK. Tugas utama guru tidak lagi terbatas hanya mengajar, tetapi harus mengembangkan dan

menyiapkan lingkungan belajar, bekerjasama dengan industri, dan menempatkan kebutuhan dunai kerja sebagai sasaran.

Berbagai upaya pengembangan sarana fisik, reformasi kurikulum, pengembangan standar-standar bidang keahlian, perlu selaras dengan upaya peningkatan mutu guru kejuruan. Kepincangan mutu guru SMK ikut mengurangi mutu sumber daya manusia lulusan SMK, dan pada gilirannya mempengaruhi daya saing. Oleh karena itu lulusan LPTK harus dapat bersaing terutama untuk mengisi pasar kerja pada pendidikan kejuruan. Demikian juga yang ada di sekolah menengah kejuruan. Kesiapan SMK dalam mengembangkan pendidikan kejuruan sangat diperlukan dalam meningkatkan mutu pendidikan vokasi.

Mutu Pendidikan

Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam "proses pendidikan" yang bermutu terlibat berbagai input, seperti: bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif.

Berbicara mutu pendidikan, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional telah jelas menyatakan bahwa : Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 10 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan

pendidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 34 ayat (3) juga menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Melihat penjelasan dari pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, jelaslah bahwa kualitas mutu pendidikan adalah menjadi suatu kebutuhan dan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah bersama-sama penyelenggara pendidikan untuk kemudian diterima oleh setiap peserta didik. Karena memperoleh pendidikan yang bermutu juga hak semua siswa, tidak hanya siswa yang kaya atau siswa yang belajar di sekolah negeri, melainkan juga siswa yang belajar pada semua tingkatan. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak mungkin dapat dicapai suatu lulusan yang bermutu apabila masih banyak terjadi perbedaan dalam segala aspek pada lembaga-lembaga pendidikan. Terlebih dalam hal yang langsung terkait dengan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar.

Mutu dalam konteks "hasil pendidikan" mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir cawu, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ulangan umum, UAS atau UN). Dapat pula prestasi di bidang lain seperti prestasi di suatu cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang

(*intangible*) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya.

Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (*output*) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu-hasil (*output*) yang ingin dicapai. Dengan kata lain tanggung jawab sekolah dalam *school based quality improvement* bukan hanya pada proses, tetapi tanggung jawab akhirnya adalah pada hasil yang dicapai.

Kualitas pendidikan sebagai penjawantahan dari suatu hasil mutu pendidikan adalah sangat terkait dengan (i) kualitas guru dan tenaga kependidikan (kepala sekolah, pengawas, penilik), (ii) kurikulum pengajaran, (iii) metode pembelajaran, (iv) bahan ajar, (v) alat bantu pembelajaran, dan (vi) manajemen sekolah. Keenam elemen ini saling berkait dalam upaya meningkatkan kualitas belajar-mengajar, yang berpuncak pada peningkatan mutu pendidikan. Berbicara mengenai kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas.

Pembangunan pendidikan tersebut antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum

dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Di samping itu peningkatan peran pendidikan ditekankan pada (1) perluasan dan pemerataan pendidikan, (2) mutu dan relevansi pendidikan, (3) *governance* dan akuntabilitas. Ketiga program tersebut sebagai upaya pembangunan pendidikan secara merata dan menyeluruh sehingga mutu SDM bisa ditingkatkan.

(<http://meretamasadepan.blogspot.com/2011/03/mutu-pendidikan-di-atas-ketidak-adilan.html>)

Kesiapan Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Vokasi

Guna mengetahui kesiapan sekolah dalam meningkatkan pendidikan vokasi, perlu kiranya untuk mengetahui secara langsung ke lapangan, dalam hal ini kita melakukan observasi sekolah baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta di wilayah Malang Raya. Untuk sekolah negeri, observasi dilakukan di SMK Negeri 7 Malang yang beralamat di Jl. Satsui Tubun IV Kebonsari Kota Malang. Sedangkan untuk sekolah swasta observasi dilakukan di SMK Budi Utomo Kepanjen, Jl. Bromo 15 d. Kepanjen Kabupaten Malang.

SMK Negeri 7 Malang memiliki lima program keahlian, yaitu Program Keahlian Tata Busana, Program Keahlian Tata Boga, Program Keahlian Kimia Analis, Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), Program Keahlian Multi Media (MM).

SMK Budi Utomo Kepanjen memiliki lima program keahlian, yaitu Program Keahlian Tata Busana, Program Keahlian Tata Boga, Program Keahlian Tata Niaga, Program Keahlian

teknik Otomotif, dan Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ),

Terkait dengan kesiapan sekolah, observasi ini dilakukan meliputi 4 aspek, yaitu (1) tata kelola lembaga, (2) guru dan tenaga pendidik, (3) kualitas pembelajaran, dan (4) kebermanfaatan lulusan.

1. Sekolah Negeri (SMK Negeri 7 Kota Malang)

a. Tata kelola lembaga

Dalam pengelolaan lembaga/sekolah, sebagai ukuran kompetensi lulusan yang mencerminkan terwujudnya visi, terlaksananya misi, dan tercapainya tujuan sekolah adalah persentase pencapaian kompetensi lulusan sesuai dengan standar minimal lulusan, kompetensi lulusan yang relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan, serta persentase jumlah peserta didik yang mencapai SKL. Kebijakan pimpinan sekolah dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan di sekolah adalah dengan melaksanakan *review* kurikulum, memonitoring pelaksanaan kegiatan pembelajaran serta implementasi model pembelajaran yang inovatif. Sedangkan penetapan penilaian berbasis kelas tidak menjadi pilihan dalam kebijakan ini.

Program perencanaan pengembangan kompetensi dan kualifikasi tenaga guru (peningkatan kualifikasi dan kompetensi) melalui (1) program pendidikan dan pelatihan, (2) magang di industri yang relevan, (3) serta pendidikan lanjutan. Sedangkan upaya pengembangan karier guru yang telah dilakukan adalah promosi guru berdasarkan suatu kemanfaatan dan kepatuhan profesionalisme serta pengembangan guru yang diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan kurikulum. Program peningkatan mutu sekolah meliputi: (1) peningkatan sarana dan

prasarana, (2) peningkatan kualitas pembelajaran, (3) peningkatan mutu pengelolaan/ manajemen sekolah, (4) peningkatan pencapaian kelulusan. Peningkatan mutu sekolah tersebut terus dijaga terkait dengan sekolah yang sudah terakreditasi A dan sudah ber-ISO, serta sebagai tempat penyelenggaraan LSP.

Upaya lembaga dalam percepatan akreditasi sekolah dan lisensi sertifikasi adalah: (1) peningkatan mutu sekolah dalam pencapaian akreditasi sekolah, (2) percepatan lisensi sertifikasi profesi, (3) Juga yang menjadi issue terbaru adalah program alih fungsi terkait pemenuhan kompetensi.

b. Guru dan Tenaga Pendidik

Secara keseluruhan, guru memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana, program keahlian memiliki guru mata pelajaran produktif sesuai dengan jumlah rombengannya dan memiliki sertifikat sesuai dengan keahliannya. Masing-masing program keahlian memiliki laboratorium / bengkel. Memiliki tenaga teknis maintenance peralatan serta adanya program *retooling* untuk peningkatan kualitas kompetensi. Upaya pengembangan kompetensi dan kualifikasi tenaga guru, dilaksanakan pelatihan berkelanjutan sesuai bidang masing-masing. Dalam pelatihan berkelanjutan sekolah menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan yang lain untuk pengembangan program pendidikan dan pelatihan. Guru produktif pernah mengikuti magang di industri

Sekolah menetapkan Sistem Penjamin Mutu. Guru Pembelajar yang dilaksanakan MGMP sebagai implementasi pelatihan berkelanjutan untuk kelompok adaptif normatif. Kalau kelompok produktif Kimia, pelatihannya di Cianjur (P4TK), Tata Busana / Tata

Boga di P3K Ketintang Surabaya, TKJ / MM di VEDC Malang. Program magang di industri untuk guru, belum semuanya tetapi pernah ada di program keahlian Tata Boga. Tempat magang di kota Malang, jumlah guru yang magang 2 orang pada setiap kompetensi, contoh yang sudah dilaksanakan pada kompetensi *Bakery*. Sedangkan untuk siswa sudah pernah dilaksanakan magang di industri yaitu satu orang dari program keahlian Tata Boga. Permintaan dari hotel di daerah tempat magang di Lombok, dan lama magang dua minggu. Sekolah mempunyai lisensi/kewenangan untuk melaksanakan uji LSP. Begitu juga guru yang sudah memiliki sertifikat LSP yang dikeluarkan BNSP mempunyai kewenangan sebagai asesor.

c. Kurikulum Pembelajaran

Kurikulum yang digunakan di sekolah adalah Kurikulum 2013. Memiliki Silabus dan RPP sesuai dengan mata pelajaran pada kompetensi kejuruan. Penataan spektrum masing-masing program keahlian juga sudah tersedia. Penyusunan RPP dikerjakan oleh masing-masing guru sesuai mata pelajaran yang di ampu. Materi kejuruan mengacu dari pusat sesuai dengan kompetensi pada program keahlian. Guru menggunakan bahan ajar (modul atau *job sheet*) sebagai acuan dalam pembelajaran sekurang-kurangnya satu modul untuk setiap mata pelajaran produktif. Guru menggunakan teknik evaluasi sesuai dengan tujuan dan karakteristik pembelajaran, dan melakukan penilaian pada setiap akhir tahapan kompetensi. Program keahlian melibatkan unsur SMK dan DU/DI yang relevan dalam melakukan analisis kurikulum

Melaksanakan pembelajaran praktik dengan target pencapaian sesuai

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Melaksanakan uji kompetensi baik bekerjasama dengan DU/DI maupun dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Sekolah mempunyai lisensi/kewenangan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK). Program Keahlian melaksanakan Praktik Kerja Industri (Prakerin) selama empat bulan. Prakerin dilaksanakan 2 tahap, pada semester ganjil dan semester genap, dilaksanakan pada setiap awal semester. Tempat prakerin pada umumnya berada di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selama pelaksanaan prakerin dilakukan monitoring ke industri minimal tiga kali, yaitu saat mengantar, saat pelaksanaan, dan saat menjemput siswa.

d. Kebekerjaan Lulusan

Sekolah menindaklanjuti *Memorandum of Understanding* (MoU) kerjasama dengan DU/DI. Pernah dilaksanakan siswa magang di industri sebagai bentuk implementasi pendalaman kompetensi. Sekolah memiliki Bursa Kerja Khusus (BKK) dengan berbagai kegiatan. BKK melakukan pendataan terhadap siswa yang sudah lulus (tamatan) sebagai upaya implementasi dari kebeerjaan lulusan.

2. Sekolah Swasta (SMK Budi Utomo Kepanjen Kabupaten Malang)

a. Tata Kelola Lembaga

Dalam pengelolaan lembaga/sekolah, sebagai ukuran kompetensi lulusan yang mencerminkan terwujudnya visi, terlaksanaannya misi, dan tercapainya tujuan sekolah adalah persentase pencapaian kompetensi lulusan sesuai dengan standar minimal lulusan, kompetensi lulusan yang relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan, serta persentase jumlah

peserta didik yang mencapai SKL. Kebijakan pimpinan sekolah dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan di sekolah adalah melaksanakan *review* kurikulum dan memonitoring pelaksanaan kegiatan pembelajaran serta implementasi model pembelajaran yang inovatif. Sedangkan penetapan penilaian berbasis kelas tidak menjadi pilihan dalam kebijakan ini.

Program perencanaan pengembangan kompetensi dan kualifikasi tenaga guru (peningkatan kualifikasi dan kompetensi) melalui program (1) pendidikan dan pelatihan, (2) serta pendidikan lanjutan. Sedangkan upaya pengembangan karier guru yang telah dilakukan adalah (1) promosi guru berdasarkan suatu kemanfaatan, kepatuhan dan profesionalisme (2) serta pengembangan guru yang diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan kurikulum. Program peningkatan mutu sekolah meliputi: (1) peningkatan sarana dan prasarana, (2) peningkatan kualitas pembelajaran, (3) peningkatan mutu pengelolaan/ manajemen sekolah, (4) peningkatan pencapaian kelulusan. Upaya lembaga dalam percepatan akreditasi sekolah dan lisensi sertifikasi adalah dengan peningkatan mutu sekolah dalam pencapaian akreditasi sekolah, dan percepatan lisensi sertifikasi profesi.

b. Guru dan Tenaga Pendidik

Secara keseluruhan, guru memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana, program keahlian memiliki guru mata pelajaran produktif sesuai dengan bidang keahliannya. Upaya pengembangan kompetensi dan kualifikasi tenaga guru, dilaksanakan pelatihan berkelanjutan sesuai bidang masing-masing. Dalam pelatihan berkelanjutan sekolah menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan

yang lain untuk pengembangan program pendidikan dan pelatihan. Seperti yang pernah dilakukan oleh guru produktif Tata Busana pernah mengikuti diklat di UPT Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan (P3K) Prop.Jawa Timur, yang berlokasi di Ketintang Surabaya. Diklat ini tidak hanya untuk gurunya tetapi siswa juga diberi kesempatan untuk mengikutinya. Program magang di industri belum pernah dilakukan baik untuk guru maupun untuk siswa.

c. Kurikulum Pembelajaran

Kurikulum yang digunakan di sekolah menggunakan Kurikulum KTSP. Memiliki Silabus dan RPP sesuai dengan mata pelajaran pada kompetensi kejuruan. Penataan spektrum masing-masing program keahlian juga tersedia. Penyusunan RPP dikerjakan oleh masing-masing guru sesuai mata pelajaran yang diampu. Guru menggunakan bahan ajar (modul atau *job sheet*) sebagai acuan dalam pembelajaran sekurang-kurangnya satu model untuk setiap mata pelajaran produktif. Guru menggunakan teknik evaluasi sesuai dengan tujuan dan karakteristik pembelajaran, dan melakukan penilaian pada akhir tahapan kompetensi. Program keahlian melibatkan unsur SMK dan DU/DI yang relevan dalam melakukan analisis kurikulum.

Melaksanakan pembelajaran praktik dengan target pencapaian sesuai Standar Kompetensi Lulusan atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Melaksanakan Uji Kompetensi Kejuruan (UKK) bekerjasama dengan DU/DI. Sekolah mempunyai kewenangan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK). Program Keahlian melaksanakan Praktik Kerja Industri (Prakerin) selama

empat bulan. Prakerin dilaksanakan, pada semester semester genap, dilaksanakan pada setiap awal semester. Tempat prakerin pada umumnya berada di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selama pelaksanaan prakerin dilakukan monitoring ke industri minimal tiga kali, yaitu saat mengantar, saat pelaksanaan, dan saat menjemput siswa.

d. Keberkerjaan Lulusan

Sekolah menindaklanjuti *Memorandum of Understanding (MoU)* kerjasama dengan DU/DI. Pelaksanaan

magang untuk siswa di industri pernah dilakukan sebagai bentuk implementasi pendalaman kompetensi. Sekolah memiliki Bursa Kerja Khusus (BKK) dengan penataan terhadap siswa yang sudah lulus (tamatan) sebagai upaya implementasi dari keberkerjaan lulusan.

Dari uraian diatas, hasil penelitian tentang disparitas kesiapan sekolah negeri dan sekolah swasta dalam meningkatkan pendidikan vokasi ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel Disparitas Kesiapan Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta dalam Meningkatkan Pendidikan Vokasi

No.	Bidang kesiapan sekolah	SMK Negeri 7 Kota Malang	SMK Budi Utomo Kab. Malang
1	Tata kelola lembaga	- Akreditasi A	- Akreditasi B
		- Sudah ber-ISO	- Belum ber-ISO
		- Sudah pernah magang di industri yang relevan	- Belum pernah magang di industri yang relevan
2	Guru dan Tenaga kependidikan	- Sudah memiliki kepala laboratorium	- Belum memiliki kepala laboratorium
		- Belum ada guru magang di industri	- Sudah ada guru magang di industri
		- Ada Program <i>retooling</i>	- Belum ada program <i>retooling</i>
		- Lisensi uji LSP	- Belum mempunyai lisensi uji LSP
		- Mempunyai kewenangan menjadi asesor	- Belum mempunyai kewenangan menjadi asesor
3	Kurikulum Pembelajaran	- Kurikulum 2013	- Kurikulum KTSP
		- Menggunakan modul dari pusat	- Menggunakan modul yang disusun sendiri
4	Keberkerjaan lulusan	- Penempatan kerja lulusan belum sepenuhnya dikoordinir oleh BKK	- Penempatan kerja lulusan dikoordinir oleh BKK

KESIMPULAN

Dari hasil penellitian ini menggambarkan adanya disparitas mutu pendidikan. Persoalan disparitas dalam aspek kualitas hasil pendidikani ini, di samping faktor-faktor yang lain, juga dipengaruhi oleh belum meratanya pemerintah dalam menerapkan kebijakan bidang pendidikan. Hal ini sangat dirasakan terutama oleh lembaga pendidikan swasta (*private education*)

misalnya dalam distribusi bantuan anggaran biaya operasional pendidikan, distribusi bantuan tenaga kependidikan (guru) ke sekolah-sekolah, distribusi bantuan baik yang berbentuk pengadaan saran-sarana dan fasilitas pendidikan maupun distribusi pemberian beasiswa.

Disparitas ini menjadi kendala dalam peningkatan mutu pendidikan vokasi. Sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan

adalah harapan kepada pemerintah dalam menerapkan kebijakan bidang pendidikan bisa merata. Upaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi lembaga pendidikan swasta untuk dapat berkompetisi dengan sekolah negeri secara adil. Implikasi yang nyata adalah terjadinya disparitas mutu hasil pendidikan yang begitu tajam. Mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas dan kuantitas. Sementara kualitas proses sangat dipengaruhi oleh keberadaan fasilitas, sarana, tenaga guru (SDM), serta finansial. Dengan pemerataan unsur-unsur dalam bidang pendidikan, akan mendorong sekolah swasta untuk lebih meningkatkan kualitas kompetensi yang dimiliki agar bisa sejajar dengan lembaga pendidikan unggulan yang lain. Dengan demikian disparitas bisa diminimalisir sehingga mutu pendidikan vokasi bisa terwujud.

DAFTAR RUJUKAN

- Damarjati, Taufik. (2016). *Konsep Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dandira, T., Maphosa, C., buga, Y. (2017), Students' workplace learning experience: How do Clothing Fashion Design Students Apply Knowledge and Skills Gained at University to the Workplace? *Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, Volume 6 (1) - (2017) ISSN : 2223 - 814X Copyright: © 2017 AJHTL - Open Acces - Online @ <http://www.ajhtl.com>
- Danim, Sudarwan. 2013. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Eddles-Hirsch, Katrina. 2015. Phenomenology and Educational Research *International Journal of Advance Research*, Vol. 3 Issue 8, August 2015.
- Hanafiah, N., & Suhana, C. (2012). *Konsep Strategi Pembelajaran*. Bandung: Refika Aditama.
- Hilal, Alyahmady Hamed dan Saleh Said Alabri. 2013. Using NVIVO for Data Analysis in Qualitative Research. *International Interdisciplinary Journal of Education*, Vol 2.
- Inpres No 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
- Jatirahayu, W. (2013), Guru Berkualitas Kunci Mutu Pendidikan, *Jurnal Ilmiah Guru "COPE"*, No. 02/ Tahun XVII/ Nopember 2013.
- Mulyasa, (2013), *The Development and Implementation of Curriculum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Slameto. (2013). *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Oun, Musab A. dan Christian Bach. 2014. Qualitative Research Method Summary. *Jornal of Multidisciplinary Engineering and Scienc eand Technology*, Vol.1, Issue 5, Desember 2014.
- Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Bandung: Citra Umbara.